MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 347/DJMT/ST.KP7.1/VII/2025

Menimbang : Bahwa dalam rangka mempercepat optimalisasi terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya khususnya di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 335/DJMT/KEP/HK.1.2.5/VII/2025 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Memberi Tugas

Kepada :

1. Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H./ 19690714199103 1006, Pembina Utama (IV/e), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Sudiyono, S.H., M.H./ 197012191998031003, Pembina Tingkat I (IV/b), Kasubdit Pembinaan Administrasi Ditbinganismintun;
3. Meylan, S.Sos., M.M./ 197905112009122003, Penata Tingkat I (III/d), Kasi Tata Kelola Ditbinganismintun;
4. Dwianto Budiman, S.Kom., M.M./ 19840811200904 1003, Penata Tingkat I (III/d), Kasi Bimbingan dan Monitoring Ditbinganismintun;
5. Intan Sari Widya Ningrum, S.H., M.H./ 199008282012122003, Penata (III/d), Kasi Statistik dan Dokumentasi Ditbinganismintun;
6. Meitina Kardina, S.E./ 198505152019032011, Penata (III/c), Kasi Evaluasi dan Rasionalisasi Ditbinganismintun;
7. Yudo Ari Kasdaroyo/ 197505151999031001, Penata Muda Tingkat I (III/b), Klerek - Pengadministrasi Perkantoran;
8. Alvin Bagus Setyawan, S.T./ 198812302020121006, Penata Muda (III/a), Pranata Komputer Ahli Pertama;
9. Ciciliya Ticoalu/ 118760, Sersan Kepala Pom/W (Sersan Kepala Pom/W), Klerek - Pengolah Data dan Informasi;
10. Priandi/PPNPN.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Untuk : Menyelenggarakan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di Hotel Aryaduta Menteng, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 23 sd. 25 Juli 2025;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

YUWONO AGUNG NUGROHO

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara